



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RYANI ADAM  
2. Jabatan : AUDITOR MUDA  
3. NHK : 524176

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.193.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 55.5 m2/50 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 605.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15495.2 m2/15495.2 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, WARISAN Rp. 190.000.000		
3. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
5. Tanah Seluas 12.85 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 53.000.000		
6. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>117.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA/MOBIL PENUMPANG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
2. MOTOR, HONDA L1FO2N36L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>23.100.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>132.600.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>18.600.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.484.300.000</b>

**III. HUTANG**

Rp. 75.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.409.300.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.